

## ABSTRACT

*The phenomenon that occurred in this initial study was in Cariu Village, Cariu Sub-District, Bogor Regency. In its implementation there were still many people who did not understand the rules of law number 6 of 2014 concerning villages, and the very low level of community participation resulted in constraints on village development. The village apparatus which should have encouraged the understanding and awareness of the community about the importance of village development was not done at all.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of law number 6 of 2014 concerning villages in Cariu Village, Cariu District, Bogor Regency and to find out the factors that influence the implementation of law number 6 of 2014 concerning villages in Cariu Village, Cariu District, Bogor Regency .*

*The research method used is qualitative descriptive method. The instrument of this research is the researchers themselves while the research sources are village apparatus and the people of Cariu Village, Cariu District, Bogor Regency. Data were obtained through observation, interviews, documentation and literature studies and using data analysis techniques Miles and Huberman.*

*In this study, researchers examined the implementation of policy, the researchers used the theory of policy implementation model George Edward III in Widodo (2017) about four factors that play an important role in achieving successful implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.*

*Based on the results of the study, the implementation of policy number 6 of 2014 concerning villages in Cariu Village, Cariu Sub-District, Bogor Regency has not run optimally. First, communication has not gone well yet there has been no socialization to the community. Second, resources are not optimal because the quality of resources that are still minimal needs to be improved. Third, disposition is not optimal with a lack of understanding of law number 6 of 2014 concerning villages. Fourth, the bureaucratic structure has been effective with the existence of Perdes made by the BPD and clear fragmentation procedures.*

*Keywords: Implementation of Policies, Village Regulations, Village and Community Apparatus*

## ABSTRAK

Fenomena yang terjadi dalam penelitian awal ini yaitu di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor, dalam pelaksanaannya masih banyak masyarakat yang tidak paham akan aturan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, lalu tingkat partisipasi masyarakat yang sangat rendah mengakibatkan terhambatnya pembangunan desa. Aparatur desa yang seharusnya mendorong untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya pembangunan desa tidak dilakukan sama sekali.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sedangkan sumber penelitiannya adalah aparatur desa dan masyarakat Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti tentang implementasi kebijakan maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan model George Edward III dalam Widodo(2017) tentang empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor belum berjalan optimal. *pertama*, komunikasi belum berjalan dengan baik belum adanya sosialisasi kepada masyarakat. *Kedua*, sumber daya belum optimal karena kualitas sumber daya yang masih minim perlu ditingkatkan. *Ketiga*, disposisi belum optimal dengan kurangnya pemahaman tentang undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Keempat*, struktur birokrasi telah efektif dengan adanya Perdes yang dibuat oleh BPD dan prosedur fragmentasi yang sudah jelas.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Desa, Aparatur Desa dan Masyarakat**